

### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kondisi perekonomian Kota Kota Tidore Kepulauan dapat digambarkan melalui rancangan Kerangka Ekonomi, guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan berbagai kebijakan yang akan ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien.

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah dan Perkiraan Tahun 2018**

##### **3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah**

###### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat seberapa jauh keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di suatu daerah. Pembangunan ekonomi tidak saja difokuskan pada pertumbuhan yang tinggi, akan tetapi lebih diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit kesenjangan antara kelompok yang berpenghasilan tinggi dengan kelompok yang berpenghasilan rendah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beserta turunannya merupakan salah satu indikator kemajuan kegiatan perekonomian dalam suatu wilayah. Secara konsep maupun implementasi, PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah pada suatu periode. Penilaian PDRB

dapat dilakukan menggunakan dua versi penilaian yakni PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dinilai berdasarkan harga pasar pada tahun bersangkutan. Dengan perkataan lain, PDRB atas dasar harga berlaku memberikan informasi penting kepada kita untuk melihat perubahan pola struktur perekonomian suatu wilayah disertai bagaimana perkembangan pendapatan perkapitanya.

PDRB atas dasar harga konstan, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dinilai berdasarkan harga pada tahun tertentu yang dipilih (ditetapkan) sebagai tahun dasar. Dengan perkataan lain, PDRB atas dasar harga konstan memberikan informasi penting kepada kita untuk melihat pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun. Para ahli dan masyarakat awam menyebutnya dengan perkataan pertumbuhan ekonomi. Tahun dasar sebagai pijakan untuk mengukur PDRB atas dasar harga konstan adalah tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan lima tahun terakhir ini bernilai positif, dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat disampaikan bahwa, Tingkat Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 adalah sebesar 6,43 persen dengan PDRB 1.6 T sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 6,35 persen, 6,23 persen, 6,12 persen dan 6,20 persen. Nilai PDRB harga konstan untuk keempat tahun tersebut adalah 1,34 T, 1,42 T, 1,51 T dan 1,60 T Rupiah.

PDRB Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2015 mengalami perubahan setelah diberlakukan System Neraca Nasional (SNA) yang diimplementasikan melalui perubahan perhitungan tahun dasar atau acuan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun dasar 2000 menjadi 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perubahan tersebut disertai dengan penambahan sektor lapangan usaha dari 9 sektor menjadi 17 sektor.

Penghitungan PDRB Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 2.09 T, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 1.60 T. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan dibanding tahun 2014, dimana PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 1.87 T, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 1.51 T. Dari data yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 – 2015 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	327,745.1	355,111.4	400,605.6	451,225.6	502,169.1	541,141.7
B	Pertambangan dan Penggalian	706.8	773.5	891.5	952.4	1,063.2	1,182.4
C	Industri Pengolahan	56,182.0	59,364.1	63,674.1	68,356.5	74,199.5	79,942.8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	917.5	996.2	1,141.1	978.5	1,598.4	2,587.1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,768.1	1,844.4	1,995.9	2,213.4	2,481.9	2,717.1
F	Konstruksi	78,147.6	85,113.1	98,270.8	104,810.5	117,252.3	135,227.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	113,614.7	126,098.7	140,754.0	156,751.5	180,835.8	210,164.1
H	Transportasi dan Pergudangan	40,731.9	43,528.6	48,164.8	56,134.1	67,154.7	78,821.2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,028.9	2,183.1	2,487.2	2,771.6	3,210.6	3,563.3
J	Informasi dan Komunikasi	42,198.7	45,052.9	48,081.0	52,632.5	59,357.1	66,665.3
K	Jasa Keuangan & Asuransi	21,536.2	28,173.0	33,988.5	38,648.8	41,765.1	45,316.1
L	Real Estate	1,042.6	1,164.3	1,231.7	1,363.0	1,511.5	1,721.4
M,N	Jasa Perusahaan	5,291.4	5,508.6	5,945.6	6,417.4	7,174.3	7,926.3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	408,824.8	477,806.6	540,175.8	598,136.5	690,169.2	786,102.3
P	Jasa Pendidikan	52,149.9	56,154.6	59,302.9	63,675.3	71,109.8	79,974.4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,460.7	25,592.8	27,617.6	31,128.0	36,588.2	42,261.4
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,445.6	7,623.6	8,231.8	8,624.7	9,603.9	10,911.7
	<b>PDRB</b>	<b>1,183,792.3</b>	<b>1,322,089.4</b>	<b>1,482,559.9</b>	<b>1,644,820.1</b>	<b>1,867,244.8</b>	<b>2,096,226.4</b>

Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan

Sejak pertengahan tahun 2010 adanya perpindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara ke Sofifi yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Kota Tidore Kepulauan merupakan faktor utama yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi Kota Tidore Kepulauan. Jika sebelumnya kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan paling mendominasi struktur perekonomian maka pada tahun 2015 turun menjadi urutan kedua dalam menopang perekonomian. Namun demikian, data Survey Kerja Angkatan Nasional 2014 mendukung bahwa sebesar 40% penduduk masih bekerja di sektor pertanian. Pada urutan ketiga kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mendominasi struktur perekonomian sebesar 10,03%.

## b. Tingkat Inflasi

Dari hasil pemantauan BPS Provinsi Maluku Utara, pada pasar tradisional dan pasar modern di wilayah Kota Tidore Kepulauan, Pada Bulan Februari 2017 mengalami inflasi sebesar 0,03 %. Sementara untuk bulan Maret 2017 Kota Tidore Kepulauan mengalami keadaan yang terbalik dengan tingkat deflasi sebesar 0,31 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 130,72 %. Inflasi tahun Kalender dan inflasi years on years Kota Tidore Kepulauan masing-masing sebesar 1,19 % dan 3,82 %.

Untuk Kota Tidore Kepulauan keadaan deflasi terjadi pada dua kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,32 % dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,52 %. Sementara inflasi terjadi pada lima kelompok pengeluaran lainnya diantara kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,01 %; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, gas dan Bahan Bakar sebesar 0,08 %; Kelompok Sandang sebesar 0,04 %; Kelompok Kesehatan sebesar 0,06 % dan Kelompok Pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,01 %.

Untuk triwulan kedua, perkiraan tekanan inflasi akan berkisar  $4,32 \% \pm 1 \%$  (yoy) atau mengalami peningkatan dibanding inflasi triwulan berjalan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian tariff listrik dan pergeseran periode puncak konsumsi masyarakat menjadi penyebab kondisi tersebut. Sementara itu, trend peningkatan harga minyak dunia dapat menjadi resiko utama pemicu tekanan inflasi sepanjang 2017. Dengan memperhatikan risiko-risiko tersebut, inflasi pada tahun 2017 diperkirakan mencapai  $4,21 \% \pm 1 \%$  (yoy).

## c. Pendapatan Regional Perkapita

Perbandingan pendapatan perkapita nasional, Provinsi Maluku Utara dan Kota Tidore Kepulauan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.2. Perbandingan Pendapatan Regional Perkapita Kota Tidore Kepulauan dengan Provinsi Maluku Utara dan Kab/Kota Tetangga Tahun 2010-2015

PDRB PER KAPITA (RIBU Rp)	2010	2011	2012	2013	2014
NASIONAL	28,778.2	32,363.7	35,105.2	38,279.9	41,808.7
MALUKU UTARA	14,361.5	16,002.6	17,726.1	19,230.1	21,124.3
TIKEP	13,076.2	14,388.4	15,890.4	17,313.9	19,513.9
TERNATE	18,899.0	21,460.3	24,081.9	26,746.6	30,007.3
HALBAR	9,342.6	10,342.6	11,311.0	12,278.7	13,459.6

Sumber: BPS Prov.Malut

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita secara kasar dapat digunakan sebagai pendekatan indikator pendapatan per kapita yang mencerminkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita juga merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, secara ekonomi semakin tinggi pula tingkat kemakmuran masyarakat tersebut.

PDB per kapita tahun 2014 atas dasar harga berlaku tercatat 41.808,7 ribu rupiah (sekitar 41,8 juta rupiah) sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara, tercatat sebesar 21,1 juta rupiah. PDRB per kapita Kota Tidore Kepulauan berada dibawah Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 19, 5 juta rupiah

Tabel 3.3. PDRB Perkapita Tahun 2011s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai PDRB (Rp)	1,322,089.50	1,482,559.90	1,644,820.30	1,867,244.60	2,096,226.30
Jumlah Penduduk (jiwa)	102,622	105,741	109,227	109,202	110,102
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	12,883.10	14,020.67	15,058.73	17,099.00	19,038.95

Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan

#### d. Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini

Gini ratio merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai gini ratio antara 0 dan 1. Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai gini makasemakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Standar penilaian ketimpangan Gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- $GR < 0,4$  : dikategorikan sebagai ketimpangan rendaah
- $0,4 < GR < 0,5$  : dikategorikaan sebagai ketimpangan sedaang (moderat)
- $GR > 0,5$  : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Tabel 3.4. Perbandingan Gini Rasio Antara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara dan Nasional 2010-2015

GINI RATIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
NASIONAL	0.380	0.410	0.410	0.410	0.410	0.410
MALUKU UTARA	0.320	0.335	0.332	0.315	0.324	0.280
TIKEP	0.227	0.251	0.239	0.257	0.222	0.205
TERNATE	0.233	0.276	0.289	0.254	0.293	0.245
HALBAR	0.311	0.255	0.252	0.223	0.249	0.234

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

#### e. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan dapat kami sampaikan, bahwa berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2015 menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada tahun 2010 – 2015, seperti: Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Beasiswa Bagi Siswa Keluarga Miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA), Bantuan Stimulan Peralatan/TTG, Bantuan RASKIN, Bantuan Modal, Bantuan Ternak, Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pelatihan Ketrampilan, Termasuk PNPM Mandiri dapat berjalan dengan baik dan berhasil.

Adapun Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tidore Kepulauan dari Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tidore Kepulauan  
Dari Tahun 2010 - 2015

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2010	99.416	6.342	6,38
2011	102.622	6.816	6,64
2012	105.741	5.600	5,29
2013	109.227	5.600	5,13
2014	109.202	5.500	5,03
2015	110.102	5.210	4,73

Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015

Tabel 3.6. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Tidore Kepulauan dengan Prov. Maluku Utara dan Nasional

No	Tingkat	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Tidore Kepulauan	6.01	6.38	6.64	5.29	5.13	5.03	4,73
2	Provinsi Maluku Utara	10.36	9.42	9.18	8.47	7.50	7.30	6.84
3	Indonesia	14.15	13.33	12.49	11.96	11.36	11.25	11.22

Sumber : BPS Prov. Maluku

Dari Tabel perbandingan tersebut diatas dapat dilihat bahwa Tingkat kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan pada Maret 2015 yaitu sebesar 4,73 persen atau turun dibandingkan tingkat kemiskinan pada Maret 2014 yang sebesar 5,03 persen, Tingkat kemiskinan di Kota Tidore lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara (6,84 persen) dan cukup jauh dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (11,22%). Tren

kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan cenderung meningkat pada periode 2009-2011, sementara tingkat kemiskinan provinsi Maluku Utara cenderung menurun pada 2009-2015, sama halnya dengan tingkat kemiskinan nasional yang juga turun pada periode 2009-2014.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab, maka penyelenggaraan roda pemerintahan harus efektif, efisien dan sistematis, diperlukan perencanaan strategis. Sebagai langkah untuk mewujudkan kebijakan tersebut Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan selaras dengan upaya pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rancangan RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021.

Sistem penganggaran di lingkungan organisasi pemerintah dalam perkembangannya telah menjadikan instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besaran anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan dasar masyarakat sebagai konsekuensi dari pelaksanaan urusan wajib dan peningkatan daya saing sebagai konsekuensi dari pelaksanaan urusan pilihan. Anggaran daerah sebagai alat perencanaan kegiatan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian. Dengan demikian, agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Penganggaran sektor publik pemerintah Kota Tidore Kepulauan selalu diupayakan agar menggambarkan karakteristik umum sebagai berikut ;

- o Komprehensif/komparatif ;
- o Terintegrasi dan lintas sektoral ;
- o Proses pengambilan keputusan yang rasional ;
- o Berjangka panjang ;
- o Spesifikasi tujuan dan perangkaian prioritas ;
- o Analisa total cost dan benefit (termasuk opportunity cost ;
- o Beorientasi *value for money* ;
- o Kecermatan pengukuran dan pengawasan kinerja,

Perencanaan tersebut tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Arah kebijakan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Oleh karenanya penyusunan APBD harus pula memperhatikan peran dan fungsi APBD sebagai fungsi instrument otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilitasi.

Seluruh pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dapat terlihat dalam realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.7. REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2014 S/D 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI 2014	REALISASI 2015	TARGET SETELAH PERUBAHAN 2016	APBD 2017	PROYEKSI/ TARGET 2018
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>27,672,173,876</b>	<b>33,695,174,504</b>	<b>41,662,243,410</b>	<b>45,525,211,410</b>	<b>47,033,838,295</b>
1.1.1	Pajak Daerah	5,012,335,900	5,547,372,952	5,870,000,000	6,580,000,000	7,275,000,000
1.1.2	Retribusi Daerah	15,497,209,940	18,824,428,940	26,347,242,310	29,967,211,410	29,958,832,310
1.1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	615,545,811	0	840,000,000	1,200,000,000.00	1,340,518,455
1.1.4	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	6,547,082,225	9,323,372,612	8,605,001,100	7,778,000,000	8,459,487,530
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>578,229,073,278</b>	<b>599,668,846,993</b>	<b>599,668,846,993</b>	<b>654,804,597,000</b>	<b>658,926,860,250</b>
1.2.1	Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	31,672,891,278	26,164,908,993	26,164,908,993	17,383,240,000	17,383,240,000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	497,417,022,000	514,588,698,000	514,588,698,000	554,976,092,000	554,976,092,000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	49,139,160,000	58,915,240,000	58,915,240,000	82,445,265,000.00	86,567,528,250.00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>45,823,738,362</b>	<b>76,683,149,872</b>	<b>76,683,149,872</b>	<b>56,244,505,000</b>	<b>56,244,505,000</b>
1.3.1	Hibah	0	0	0	2,000,000,000.00	
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0		
1.3.3	Bagi hasil pajak dari propinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	5,693,814,362	12,261,522,872	12,261,522,872	5,750,000,000	7,750,000,000
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	40,129,924,000	64,421,627,000	64,421,627,000	48,494,505,000	48,494,505,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari propinsi pemerintah daerah lainnya	0	0	0		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>651,724,985,516</b>	<b>710,047,171,369</b>	<b>718,014,240,275</b>	<b>756,574,313,410</b>	<b>762,205,203,545</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan BPKAD Kota Tidore Kepulauan



### **3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Peran yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat semakin besar, hal ini sebagai implikasi semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin kompleksnya kehidupan masyarakat dan semakin besarnya tuntutan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan.

Dalam menjalankan amanat tersebut, pemerintah daerah membutuhkan dukungan keuangan yang memadai. Selain itu, keuangan yang ada juga harus dikelola dengan baik dan benar agar efektif mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat keuangan meliputi semua kegiatan yang dilaksanakan pemerintah karena setiap kegiatan tersebut selalu berkepentingan dengan uang untuk membiayai maka pemerintah daerah menentukan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal, dengan melaksanakan:

- a. Penetapan dasar hukum pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta melakukan penyesuaian tarif untuk objek pajak tertentu.
- b. Pembinaan manajemen data penerimaan pendapatan.
- c. Meningkatkan penerimaan penempatan non konvensional.
- d. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan.
- e. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pengutannya dan menghindari distorsi terhadap perekonomiannya.
- f. Meningkatkan sinergitas koordinasi di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan SKPD penghasil.
- g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- h. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.
- i. Mendorong meningkatnya pendapatan daerah dari komponen-komponen PAD yang masih berpeluang dan berpotensi untuk dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak merugikan masyarakat.
- j. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan.

### **3.2.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, meliputi :

- a. Perluasan regulasi yang menyangkut dengan pelaksanaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- b. Peningkatan sarana dan prasarana dibidang kebudayaan dan kepariwisataan untuk menarik minat turis lokal dan manca negara untuk visitasi ke Kota Tidore Kepulauan.
- c. Kegiatan intensifikasi berupa penyelenggaraan pemungutan dan pemanfaatan pendapatan berbasis efektifitas dan efisiensi.
- d. Kegiatan ekstensifikasi berupa penciptaan objek dan subjek yang baru.
- e. Penyusunan data base untuk objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
- f. Kerja sama dengan kantor pelayanan pajak pratama sebagai persiapan pengalihan PBB sektor perkotaan pedesaan menjadi pajak daerah.
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat atas kewajiban pajak dan retribusi daerah.
- h. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan industri yang mendukung pengembangan agroindustri, agrobisnis dan agrowisata.
- i. Penyediaan data base perencanaan dalam pengembangan potensi daerah.
- j. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik minat investor dalam menanamkan modal usaha.

#### **3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget*. *Traditional budget* didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line-item* dan *incrementalism*, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya berdasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran tersebut. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan mempertahankan basis seperti itu, APBD semakin berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah di atasnya. Hal tersebut bisa saja menyebabkan semakin dominannya peran pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Performance merupakan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus bisa mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Karena otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan harus lebih merupakan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, melalui pengelolaan transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Dengan demikian pemerintah daerah harus membuka ruang yang lebar bagi masyarakat untuk mengakses proses penganggaran, utamanya bertalian bagi pemenuhan kebutuhan hidup dan pemenuhan hak-hak dasar.

Dengan asumsi dan kondisi perekonomian tersebut dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi daerah serta berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka kebijakan belanja disusun dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional efisien dan efektif, antara lain :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang-undang.
- b. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan sistem birokrasi dan kinerja aparatur untuk kepentingan pelayanan publik.
- c. Melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Kebijakan belanja daerah Kota Tidore Kepulauan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.8. REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET BELANJA DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2014 S/D 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2014	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	APBD 2017	PROYEKSI / TARGET 2018
2.1	Belanja Tidak Langsung	292,247,131,894	347,729,681,314	368,203,220,326	433,343,135,307	416,537,878,543
2.1.1	Belanja Pegawai	265,241,872,994	291,386,685,392	305,894,520,343	326,984,977,107	307,894,520,343
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	14,880,185,900	30,489,778,754	4,096,600,000	4,214,800,000	5,000,000,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,610,500,000	189,690,000	201,500,000	500,000,000	1,000,000,000
2.1.6	Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa & Partai Politik	9,667,822,000	25,244,283,168	57,464,779,000	98,643,358,200	98,643,358,200
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	846,751,000	419,244,000	545,820,983	3,000,000,000	4,000,000,000
2.2	Belanja Langsung	348,284,146,616	379,698,094,668	430,400,448,303	345,568,476,588	351,189,100,409
2.2.1	Belanja Pegawai	33,644,848,092	31,521,720,875	42,283,522,682	41,161,848,718	41,161,848,718
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143,940,679,714	160,029,721,155	193,456,024,323	200,769,409,502	202,267,770,073
2.2.3	Belanja Modal	170,698,618,810	188,146,652,638	194,660,901,298	103,637,218,368	107,759,481,618
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>640,531,278,510</b>	<b>727,427,775,982</b>	<b>798,603,668,629</b>	<b>778,911,611,895</b>	<b>767,726,978,952</b>

Sumber : BPKAD dan BAPELITBANG Kota Tidore Kepulauan

**Tabel 3.9 Pagu Belanja Langsung Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Tahun 2018**  
**Kota Tidore Kepulauan**

No	Organisasi Pemerintahan Daerah	Belanja Langsung Tahun 2017	Pagu Indikatif Tahun 2018
1	Dinas Pendidikan	22,151,000,000	22,815,530,000
2	Dinas Kesehatan	23,675,236,000	24,148,740,720
3	Rumah Sakit Daerah	46,822,096,868	47,758,538,805
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	70,319,220,000	71,859,937,926
5	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	17,942,000,000	18,300,840,000
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5,037,000,000	5,087,370,000
7	Dinas Perhubungan	5,818,000,000	5,876,180,000
8	Dinas Lingkungan Hidup	5,500,000,000	5,555,000,000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,900,000,000	2,929,000,000
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,400,000,000	2,424,000,000
11	Dinas Sosial	1,350,000,000	1,363,500,000
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,150,000,000	2,171,500,000
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,850,000,000	1,868,500,000
14	Dinas Perindagkop dan UKM	4,300,000,000	4,343,000,000
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1,900,000,000	1,919,000,000
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5,750,000,000	5,807,500,000
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1,500,000,000	1,515,000,000
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,500,000,000	1,515,000,000
19	Satuan Polisi Pamong Praja	2,000,000,000	2,020,000,000
20	Sekretariat Daerah	47,055,905,000	47,526,464,050
21	Sekretariat DPRD	17,425,000,000	17,599,250,000
22	Badan Pendapatan Daerah	2,935,100,000	2,964,451,000
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	4,900,000,000	4,949,000,000
24	Inspektorat Daerah	3,000,000,000	3,030,000,000
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5,900,000,000	5,959,000,000
26	Dinas Ketahanan Pangan	1,500,000,000	1,515,000,000
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,255,000,000	4,297,550,000
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,000,000,000	2,020,000,000
29	Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik	1,500,000,000	1,515,000,000
30	Dinas Pertanian	5,200,000,000	5,252,000,000
31	Dinas Kelautan dan Perikanan	6,531,918,720	6,597,237,907
32	Kecamatan Tidore	800,000,000	808,000,000
33	Kecamatan Tidore Timur	800,000,000	808,000,000
34	Kecamatan Tidore Selatan	800,000,000	808,000,000
35	Kecamatan Tidore Utara	800,000,000	808,000,000
36	Kecamatan Oba	850,000,000	858,500,000
37	Kecamatan Oba Utara	800,000,000	808,000,000
38	Kecamatan Oba Tengah	800,000,000	808,000,000
39	Kecamatan Oba Selatan	851,000,000	859,510,000

No	Organisasi Pemerintahan Daerah	Belanja Langsung Tahun 2017	Pagu Indikatif Tahun 2018
-	Kelurahan Seli	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Topo	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Soadara	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Topo Tiga	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Soasio	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Folarora	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Gurabunga	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Gamtufkange	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Tomagoba	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Goto	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Indonesiana	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Toloa	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Dokiri	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Tuguiha	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Tomalou	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Gurabati	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Tongowai	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Jaya	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Fobaharu	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Ome	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Rum Balibunga	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Rum	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Gubukusuma	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Sirongo Folaraha	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Afa-Afa	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Mareku	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Bobo	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Mafututu	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Tosa	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Dowora	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Kalaodi	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Guraping	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Sofifi	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Akelamo	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Payahe	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Tambula	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Tuguwaji	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Cobodoe	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Doyado	300,000,000	303,000,000
-	Kelurahan Jiko Cobo	300,000,000	303,000,000
<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>		<b>345,568,476,588</b>	<b>351,189,100,409</b>

Sumber : BAPELITBANG Kota Tidore Kepulauan

### 3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan pembangunan bersumber dari Dana Alokasi Umum, Alokasi Khusus, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pembangunan pada tahun mendatang harus lebih dititik beratkan pada program-program prioritas untuk menjawab persoalan-persoalan mendesak yang dialami oleh masyarakat. Selain itu juga dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2017 harus menggunakan prinsip-prinsip anggaran antara lain ; *Pertama* ; transparansi dan akuntabilitas anggaran. *Kedua* ; disiplin anggaran. *Ketiga* : Keadilan anggaran. *Empat*; efisiensi dan efektifitas anggaran serta *Lima*; format anggaran. Arah kebijakan anggaran Kota Tidore Kepulauan yang meliputi kebijakan di bidang pendapatan dan kebijakan bidang belanja daerah. Untuk itu kedua kebijakan anggaran tersebut harus diarahkan pada program-program prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan 2016-2021.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut :

**Tabel 3.10. REALISASI PEMBIAYAAN  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2014 S/D 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI 2016	APBD 2017
3.1	Penerimaan Pembiayaan	49,808,774,452	59,042,481,463	40,325,931,489	30,837,298,485
3.1.1	SILPA Tahun sebelumnya	49,808,774,452	59,042,481,463	40,325,931,489	30,837,298,485
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Dana Daerah Yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	1,335,945,362	-	8,500,000,000
3.2.1	Pembentukan dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2,000,000,000	1,000,000,000	-	8,500,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		335,945,362	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	47,808,774,452	57,706,536,101	40,325,931,489	22,337,298,485

Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan